DATA DAN FAKTA SAWIT INDONESIA : LUAS, SEBARAN DAN TANTANGANNYA

Keragaan Kelapa Sawit Indonesia

Luas Areal (Juta Ha)

Produksi CPO (Ton)

Sumber: Statistik Perkebunan, 2018-2020

Produktivitas CPO (Ton/Ha) :

Volume Ekspor CPO (000 Ton)

Peran Kelapa Sawit Indonesia

Profil Industri

Padat karya

Nilai Ekspor

Total Nilai Ekspor
Rp.304 Trilyun*
Ekspor terbesar, lebih besar dari Migas

*) Tahun 2019

Lapangan Kerja

4,2 Juta
Lapangan Kerja Langsung

12 Juta
Lapangan Kerja Tak Langsung

Lapangan Kerja Pertanian

41% Petani Kecil
dengan **2,3 Juta**
lapangan kerja di bidang pertanian yang menyerap
4,6 Juta pekerja

Ketahanan Energi

Menggantikan penggunaan bahan bakar fosil

2,3 Juta KL

Melalui program Mandatori Biodiesel

Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat bergantung pada industri sawit Indonesia. Pertumbuhan industri sawit akan berperan penting pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

PENYEBARAN SAWIT INDONESIA, 2018

Luas (jt Ha)	Protas (Ton/ha)	Prod (Jt Ton)
14,03	3,55	37,8

Sumber : Statistik Perkebunan 2016 - 2018
*Keterangan *) Angka Sementara*

Tantangan

Produktivitas Rendah

Produktivitas rata-rata 3,6 ton/ha/thn.
Potensi 5-6 ton/ha/thn

Data

Belum tersedianya satu data dan satu peta.

Tumpang tindih Kawasan Hutan & KHG

Terindikasi sekitar 3 juta ha sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan

Legalitas dan Perizinan

Masih terdapat kebun sawit belum memiliki legalitas (SHM, HGU)

Gangguan Usaha dan Konflik

Masih adanya pelaku usaha yg belum memenuhi kewajibannya (pemb kbn masyarakat min 20%)

Masih adanya gangguan terhadap Lingkungan dan Kebakaran lahan

Pengelolaan perkebunan belum sepenuhnya mengacu prinsip yg *sustainable*

Negative Campaign

Tuntutan negara konsumen khususnya Uni Eropa

Hilirisasi

Belum optimalnya produk turunan CPO dikembangkan industri dalam negeri

Inpres No. 8 Tahun 2018

Tanggal 20 September 2018 tentang Penundaan & Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit:

1. Menko Perekonomian;
2. Menteri LHK;
3. **Menteri Pertanian;**
4. Menteri ATR/BPN;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala BKPM;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/ Walikota.

1. Penyusunan dan verifikasi data dan peta IUP dan pendaftaran STDB beserta evaluasinya;
2. Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% ;
3. NSPK Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
4. Pembinaan kelembagaan petani sawit;
5. Intensifikasi pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit;
6. Menerapkan ISPO.

Tugas Gubernur dan Bupati/Walikota

Gubernur	Bupati/Walikota
1. Penundaan penerbitan rekomendasi/IUP kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada pada kawasan hutan kecuali yang sedang proses pasal 51 PP 104; 2. Pengumpulan dan verifikasi data dan peta ILOK, IUP atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan; 3. Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi kepada Menteri Pertanian yang menyangkut IUP dan Menteri ATR/BPN yang menyangkut ILOK; 4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi mengenai pembatalan izin dan STDB pada kawasan hutan; 5. Menyampaikan usulan kepada Menteri LHK untuk penetapan areal yang berasal dari pengembalian tanah dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi kawasan hutan.	1. Penundaan penerbitan rekomendasi/IUP kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada pada kawasan hutan kecuali yang sedang proses pasal 51 PP 104; 2. Pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan di wilayahnya oleh badan usaha maupun perseorangan; 3. Pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas ILOK, IUP atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan; 4. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan; 5. Menyampaikan hasil pengumpulan data angka 2,3 dan 4 kepada gubernur dengan tembusan Menteri Pertanian, Menteri LHK dan Menteri ATR/BPN.

PENETAPAN LUAS TUTUPAN KELAPA SAWIT NASIONAL TH 2019

KEP. MENTERI PERTANIAN NO 833 TH 2019

LUAS TUTUPAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL : **16.381.959 HA**

PENYELESAIAN DATA TEMATIK TUMPANG TINDIH KEBUN SAWIT DENGAN KAWASAN HUTAN DAN GAMBUT

PENYELESAIAN DATA TEMATIK UMUR TANAMAN (TBM, TM, TR)

PENYELESAIAN DATA TEMATIK KEPEMLIKAN KEBUN SAWIT (RAKYAT, PTPN, PBS)

PENYELESAIAN DATA TEMATIK POTENSI PEREMAJAAN SAWIT

SISTEM INFORMASI PERIZINAN PERKEBUNAN (SIPERIBUN)

1. Di *Launching* pada tanggal 24 Juli 2018 di Bogor
2. Alamat Aplikasi SIPERIBUN:

PENDATAAN PERKEBUNAN RAKYAT DENGAN APLIKASI E-STDB

Untuk pekebun yang luas areal lahannya kurang dari **25** hektar

FUNGSI E-STDB

- Pendataan Perkebunan Rakyat
- Portal pendaftaran dan penerbitan STDB
- Integrasi data STDB secara nasional

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

POTENSI DAN DASAR HUKUM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)

LUAS SAWIT DAN POTENSI PEREMAJAAN

- Total luas sawit : **16,38 juta** ha
- Luas sawit rakyat : **6,72 juta** ha
- Potensi peremajaan sawit rakyat: **2,78 juta** ha
  - ✓Plasma dan swadaya **2,27 juta** ha
  - ✓Plasma PIRBUN **0,14 juta** ha
  - ✓Plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA **0,37 juta** ha

Total Luas Sawit : 16,38 Juta ha

DASAR HUKUM

- UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- PP No.24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
- Perpres No.66 Tahun 2018 jo. No.61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Permentan No.18 Tahun 2016 Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- Permenkeu No.84 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS;
- Permentan No. 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
- Peraturan Dirut BPDP-KS No.9/DPKS/2019.
- Kepdirjenbun No.208/Kpts/KB.120/7/2019

Target PSR 2017-2022

SEBARAN POTENSI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)

Provinsi	Luas (ha)			
	PSR			Total
	APL	HP	HPK	
Aceh	94.634	397	294	95.325
Sumatera Utara	274.458	35.778	25.691	335.928
Riau	543.047	109.866	193.268	846.182
Sumatera Barat	71.931	894	1.451	74.276
Jambi	223.111	17.477	12	240.599
Bengkulu	62.481	2.350	517	65.348
Kep. Bangka Belitung	37.228	8.746	-	45.974
Sumatera Selatan	306.952	47.942	18.134	373.028
Lampung	230.156	7.077	-	237.233
Banten	3.846	1	-	3.847
Kalimantan Barat	80.859	4.434	167	85.459

Provinsi	Luas (ha)			
	PSR			Total
	APL	HP	HPK	
Kalimantan Tengah	47.771	24.507	9.787	82.065
Kalimantan Selatan	78.713	17.068	6.765	102.546
Kalimantan Timur	98.760	2.200	463	101.423
Kalimantan Utara	3.299	1.987	88	5.374
Sulawesi Tengah	23.623	23	24	23.671
Sulawesi Selatan	12.548	997	-	13.545
Sulawesi Barat	33.003	523	141	33.667
Sulawesi Tenggara	5.630	254	-	5.884
Papua	8.128	31	-	8.159
Papua Barat	3.962	-	49	4.012
Total	**2.244.141**	**282.552**	**256.851**	**2.783.544**

- **Potensi PSR : 2,78 juta ha**
- **Sebaran dominan di Sumatera dan Kalimantan**

TARGET PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) 2020-2022

Pulau	Luas (Ha)
Sumatera	397.200
Jawa	6.000
Kalimantan	86.300
Sulawesi	44.500
Papua	6.000
Total	540.000

Keterangan :

1.Target di 21 Provinsi dan 106 Kabupaten/Kota;

2.Potensi dari Perkebunan Inti Rakyat (PIR) 500.000 Ha

TARGET PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) 2020 (180.000 ha)

Keterangan :

- Potensi PSR luas areal > 50.000 ha
- Potensi PSR 10.000 ha > luas areal < 50.000 ha
- Potensi PSR luas areal < 10.000 ha

REALISASI REKOMENDASI TEKNIS DAN TRANSFER DANA BPDPKS 2017-2020

Target PSR dan Realisasi Rekomtek

*) Data sampai dengan 27 Mei 2020

2017-2020

- Realisasi rekomtek: **167.299 Ha**
- Realisasi transfer dana BPDPKS: **Rp3,4 triliun**
- Tersebar di 21 Provinsi dan 87 Kab/Kota

Tahun	Target (ha)	Prov dan Kab	Kop/ Gapoktan/ Poktan (unit)	Realisasi Rekomtek		Transfer Dana dari BPDPKS	
				(Ha)	(%)	Ha	Rp
2017	20.780	7 Prov / 20 Kab	40	14.634	70,42	13.390	334.738.802.500
2018	185.000	16 Prov / 45 Kab	176	33.842	18,29	34.616	865.403.352.500
2019	180.000	20 Prov / 79 Kab	503	88.412	49,12	58.271	1.456.776.217.500
2020	180.000	21 Prov/ 106 Kab	176	30.299	16,83	30.724	768.095.640.000
Total			**895**	**167.187**		**137.001**	**3.425.014.012.500**

*) Data sampai dengan 27 Mei 2020

Sumber : Kementan dan BPDPKS (Aplikasi PSR Online)

INPRES No.6 / 2019
Tentang RAN-KSB

Inpres Rencana Aksi Nasional
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 November 2019 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Tujuan Inpres

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- Penyelesaian status dan legalisasi lahan;
- Pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- Mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Tindakan

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun

Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa

ISPO

Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit

PERPRES NO.44 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Rancangan Permentan Tentang ISPO telah dilakukan konsultasi publik pada 18 Mei 2020.

unit analisis = unit usaha certified ISPO

unit analisis = agregat unit usaha certified SPO

Kontribusi ”New ISPO” terhadap pencapaian SDG’s 2030

ISPO berkontribusi terhadap 12 dari 17 UN SDGs

#1
Legalitas Usaha Perkebunan

#2
Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

#3
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

#4
Tanggungjawab Terhadap Ketenagakerjaan

#5
Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

#6
Transparansi

#7
Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Terima Kasih

Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian RI
Telp : (021) 7815380
Fax : (021) 7815486 - 7815586
Website : http://ditjenbun.pertanian.go.id